



TAJUK

Tangani dengan Cepat Persoalan Sampah sebelum Menggunung di Mana-Mana

Persoalan sampah terutama di Kota Jogja semakin semrawut. Bau di mana-mana karena sampah menggunung di depo-depo. Apalagi, tebaran sampah sampai ke pinggir jalan, baik jalan utama maupun di jalan-jalan sempit. Belum lagi, pemandangan antrean warga yang membuang sampah di depo maupun menunggu truk bak sampah melewati permukiman mereka. Ketika truk lewat, tanpa dikomando mereka akan melempar sampah yang sudah dibungkus plastik ke arah bak truk. Persoalan ditambah dengan kebiasaan warga yang kini

makin suka membakar sampah. Mereka susah mendapat tempat untuk membuang sampah dan tarif langganan sampah naik. Hasilnya, ketika bisa dibakar, maka tumpukan sampah akan dibakar. Itu imbas dari ketergantungan Pemerintah Kota Jogja terhadap keberadaan TPA Piyungan. Semua dibuang di situ. Ketika TPA Piyungan ditutup, maka kebingungan melanda sehingga tentunya Pemda DIY tak bisa lepas tangan. Rencana Pemda DIY kembali membuka TPA Piyungan secara terbatas perlu dikerucutkan lagi mengingat sampai Sabtu (8/6) siang belum menemui kejelasan

waktunya. Cuma, Pemda perlu membuat langkah hati-hati. Pembukaan operasional TPA perlu dilakukan Pemda DIY dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti masuknya armada swasta untuk membuang sampah. Persoalan ini kudu ditangani cepat sebelum sampah makin menggunung dan muncul konflik di masyarakat. Tempuh berbagai cara untuk solusi darurat tapi bukan dengan seandainya menindas pembuang sampah liar. Ingat, penindasan terhadap pembuang sampah liar tidak layak dilakukan selama pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang memadai. Apalagi pemerintah

tidak memberikan solusi tepat sebagai tempat pembuangan sampah. Cuma serampangan meminta masyarakat mengelola sendiri sampahnya tanpa dibekali cara bagaimana mengelola sampah. Pemda DIY perlu turun tangan dengan kondisi seperti ini terutama masa transisi desentralisasi sampah. Jangan serta merta membiarkan pemerintah kota maupun kabupaten memikirkan sendiri penanganan sampahnya. Bagi kabupaten, yang luasannya masih memungkinkan, desa-desa di kawasan aglomerasi bisa digandang

untuk ikut menangani sampah dari kota namun benar-benar harus dikelola agar dampak lingkungannya bisa ditekan. Lahan-lahan Sultan Grond (SG) di pinggir DIY sebagai tempat sementara, juga bisa dimanfaatkan yang penting disosialisasikan dengan intensif dan cermat agar diterima oleh warga setempat. Hindari konflik dengan masyarakat yang bisa muncul kapan saja karena kurangnya koordinasi soal pengelolaan sampah, mengingat urusan sampah bisa menimbulkan persoalan, entah itu bau, limbah ataupun lalu lintas armada pengangkut.

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005